

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan karena mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Kesejahteraan adalah hal yang krusial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor empat di dunia sebanyak 272.229.372 jiwa di tahun 2021,¹ tentunya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Seiring dengan banyaknya populasi penduduk menyebabkan masalah krusial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara, sebab tidak seimbangkan tenaga kerja dan pekerjaan yang ada sehingga meningkatkan angka pengangguran. Sadono Sukirno mengatakan pengangguran merupakan suatu keadaan ketika individu yang berada dalam kelompok angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkannya.² Hal ini berarti bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lowongan kerja yang ada.

¹ Dukcapil Kemendagri, *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit* <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit> (diakses pada 30 Maret 2022)

² Gatningsih, Eko, *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan* (Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017) h. 102

Banyaknya pengangguran sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat dan sumber utama kemiskinan, hal ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Terlebih ketika pandemi Covid-19 melanda ibu kota negara Indonesia membuat keadaan ekonomi mengalami penurunan sangat pesat hal ini juga berdampak pada pendapatan daerah karena banyaknya pengusaha yang harus gulung tikar sehingga berimbas dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya kondisi ini meningkatkan jumlah warga tidak mampu/miskin di DKI Jakarta. Dari data terpercaya Badan Pusat Statistik Jakarta Timur, mencatat jumlah pengangguran terbuka di Kota Jakarta Timur pada tahun 2021 sebanyak 112.754 orang.³ Hal ini tentunya diakibatkan karena pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut kegiatan sosial dan ekonomi menjadi dibatasi dan diawasi oleh protokol kesehatan yang ketat, akibatnya kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja perekonomian dan kegiatan sosial. Dari kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja sangat berdampak pada kegiatan ekonomi dan sosial termasuk dampak ketenagakerjaan.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Jakarta Timur pada tahun 2021 sebanyak 3.056.300 jiwa.⁴ Dari jumlah tersebut menyatakan jumlah pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan kerja tahun 2021 yang terdaftar sejumlah 6.641

³ Rizki Oktavian dan Sason, *Kota Jakarta Timur Dalam Angka 2022I*, (Jakarta: BPS Kota Jakarta Timur, 2022), h. 62

⁴ *Ibid*, h.419

pencari kerja terdaftar, 6.498 lowongan kerja terdaftar, dan pada penempatan kerja terdaftar sejumlah 5.943 orang. Dari data diatas berarti jumlah lowongan kerja dengan jumlah pencari kerjanya tidak seimbang, akibatnya jumlah pengangguran semakin meningkat. Secara jelas terlihat bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan masalah krusial di dalam persoalan ketenagakerjaan.

Hal tersebut tentunya menimbulkan masalah sosial yang harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang hadir karena adanya krisis yang mengenai semua lini kehidupan, maka dibutuhkan suatu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu caranya yaitu melalui pelatihan dan peningkatan produktivitas yang dapat meningkatkan kompetensi masyarakatnya serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya dalam hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menurunkan angka pengangguran adalah dengan meningkatkan pelatihan dan peningkatan produktivitas bagi masyarakat yang sedang mencari kerja. Sejalan dengan pendapat Sinambela, salah satu faktor terpenting untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah pelatihan dan pendidikan.⁵ Dengan adanya pelatihan dan pendidikan dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan keterampilan bekerja sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Upaya yang dibuat yakni dengan mengadakan pendidikan berupa kegiatan pelatihan keterampilan untuk

⁵ Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia : membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 169

membekali masyarakat dengan berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja.

Berbagai macam pelatihan yang dibuat oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakatnya sehingga potensi sumber daya yang dimiliki dapat berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Untuk itu salah satu bentuk tugas pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kepada masyarakat agar menjadi mandiri sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersatu padu menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja, sebagai upaya untuk terselenggaranya pelayanan kerja yang terpadu yang kemudian diikuti oleh kebijakan turunannya berupa peraturan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, peraturan daerah di pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota berupa program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pelatihan Tenaga Kerja yakni keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Untuk itu dalam Pasal 11

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja yang sesuai berdasarkan minat, bakat serta kemampuan melalui pelatihan kerja.

Salah satu tugas serta fungsi dari Dinas Tenaga Kerja yakni menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan produktivitas kepada masyarakat dalam golongan angkatan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur (Sudinakertransgi Jakarta Timur) sebagai unit kerja Dinas dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kota Administrasi Jakarta Timur menyediakan suatu kegiatan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6 ayat (1) yang berisi Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan atau meningkatkan, mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri lewat beberapa macam program pembangunan yang berkelanjutan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala macam kegiatan pembangunan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dalam menentukan prioritas pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan daerah, maka disusunlah Kegiatan Strategis daerah (KSD) yang terdiri atas 60 kegiatan

didalamnya. Berdasarkan pada Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, KSD adalah kegiatan yang disusun sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KSD. Salah satu KSD yang terkait untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat DKI Jakarta adalah program pelatihan dan pengembangan produktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di tengah masa pandemi Covid-19. Program tersebut adalah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). PKT adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan potensi keterampilan dan kemandirian masyarakat melalui kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, bidang pendidikan, bidang usaha, masyarakat, lembaga atau pihak lainnya yang terkait.

Pelatihan kewirausahaan selama tahun 2021 yang ada di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri ada beberapa macam. Seperti kegiatan yang diadakan secara mandiri maupun yang berkolaborasi dengan mitra seperti pelatihan wirausaha minuman kesehatan yang berkolaborasi dengan PT Bintang Toedjoe, pelatihan wirausaha aneka kue yang berkolaborasi dengan PT United Tractor, pelatihan wirausaha kreasi kue dan minuman yang berkolaborasi dengan PT Sari Enesis Indah dan pelatihan tata rias

yang berkolaborasi dengan PT Martina Berto⁶. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membentuk pelaku usaha di bidang barang dan jasa. Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, maka pokok bahasan yang akan diangkat dan diteliti oleh penulis adalah “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan Oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Dilakukannya penelitian ini tentunya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur.

⁶ Data Kerjasama pelatihan PKT dengan CSR milik Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan fungsi pelayanan publik dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi peningkatan penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik pembahasan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan saran dan solusi alternatif untuk dinas, badan atau lembaga yang lainnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal pelatihan dan peningkatan produktivitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta memberikan arah dan cerminan modul yang tercantum di penelitian ini. Penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang timbulnya masalah dan fenomena sosial yang akan diamati oleh penulis. Selanjutnya menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian dan terakhir menjelaskan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan penelitian sebelumnya, teori dan konsep serta kerangka pemikiran sebagai parameter dari para ahli sebagai dasar dari penelitian yang akan diangkat dengan berbagai literatur yang sesuai dengan jenis penelitian ini. Penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya yang hasil penelitiannya bisa dijadikan sebagai landasan dan perbandingan dalam melaksanakan penelitian. Sedangkan kerangka berpikir merupakan gambaran alur pemikiran dari penulis untuk melaksanakan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Di bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai, pendekatan penelitian dan jenisnya. Kemudian menentukan informan yang dipilih untuk penelitian, menjelaskan bagaimana cara pengumpulan datanya, pengolahan dan cara kajian data yang dipakai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dalam observasi yang dilakukan penulis merujuk pada karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan hasil keseluruhan yang telah diteliti oleh penulis yang dirangkum secara jelas sehingga menghasilkan kesimpulan dari karya

ilmiah yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya memberikan saran untuk fenomena yang diteliti.

